



**RENCANA KERJA
KECAMATAN KALIBAGOR
TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KECAMATAN KALIBAGOR
KABUPATEN BANYUMAS**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kalibagor (Renja Kecamatan Kalibagor) Kabupaten Banyumas Tahun 2026. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :

- a. RPJPD;
- b. RPJMD ;
- c. Renstra SKPD;
- d. RKPD; dan
- e. RENJA SKPD

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kalibagor Tahun 2026, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mencapai target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kecamatan Kalibagor tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Mewujudkan banyumas sebagai barometer pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas , berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatifitas berbasis sumber daya lokal
5. Menciptakan Iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas insfraktuktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kalibagor tahun 2026, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Kalibagor Tahun 2026 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

2.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11);
24. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

3.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan Kalibagor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

Sedangkan tujuan :

1. Sebagian acuan Kecamatan Kalibagor dalam mengoperasionalkan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Kalibagor selama tahun 2026.
3. Merumuskan keterkaitan perencanaan penganggaran pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan Kecamatan Kalibagor selama tahun 2026.

4.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika

penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun $n-2$) dan perkiraan capaian tahun berjalan ($n-1$), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals). Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD, menguraikan proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan serta penjelasan proses tersebut dilakukan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil

pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbangdes.

2.6 Inovasi Perangkat Daerah, dalam bagian ini diuraikan inovasi yang ada di kecamatan Kalibagor dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektifitas pelaksanaan program/kegiatan, serta efisiensi penggunaan sumber daya.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM

3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.2 Program dan kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Kalibagor adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Kalibagor. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kalibagor ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Kalibagor selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2024

Anggaran Tahun 2024 Kecamatan Kalibagor baik belanja operasi maupun belanja modal sebesar Rp. 2.554.392.742,- dimana belanja

operasi sebesar Rp. 2.518.722.742,- dan belanja modal sebesar Rp. 36.295.000,- dan belanja modal peralatan dan mesin dengan 6 program dan 11 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp.2.349.929.441,- (91,99%) dimana realisasi belanja operasi sebesar Rp.2.313.689.441 (91,85%), dan belanja modal sebesar Rp. 36.240.000,- (99,84%) dengan capaian kinerja fisik sebesar 91,11% dan capaian kinerja keuangan sebesar 91,99%

Evaluasi Kinerja Tahun lalu (tahun 2024) dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel .2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kecamatan Kalibagor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir periode RPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2025)	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10=(9/8)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Indeks	N/A	87 Indeks	94 Indeks	108,9%	88 Indeks	94 Indeks	106,81%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	N/A	4 Laporan	2 Laporan	50%	4 Laporan	6 Laporan	50%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	180 Laporan	N/A	60 Laporan	60 Laporan	66,67%	60 Laporan	120 Laporan	66,66%
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen	N/A	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	4 Unit	N/A	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	100%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	N/A	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	8 Laporan	66,66%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	N/A	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	8 Laporan	66,66%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	N/A	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	100%	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	100%
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	8 Dokumen	N/A	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	N/A	60 Kegiatan	60 Kegiatan	100%	60 Kegiatan	60 Kegiatan	100%

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase fasilitasi kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	88%	N/A	88%	88%	100%	88%	88%	100%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	N/A	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100%	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100%
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyarakatan	N/A	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100%	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100%
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	N/A	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	6 Laporan	100%
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100%	N/A	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	18 Laporan	N/A	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	12 Laporan	66,66%
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	N/A	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	8 laporan	66,66%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90 Orang	N/A	30 Orang	30 Orang	100%	30 Orang	60 Orang	66,66%

Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	180 Orang	N/A	60 Orang	60 Orang	100%	60 Orang	120 Orang	66,66%
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	180 Orang	N/A	60 Orang	60 Orang	100%	60 Orang	120 Orang	66,66%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	36 Dokumen	N/A	12 Dokumen	12 Dokumen	1000%	12 Dokumen	24 Dokumen	66,66%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes tepat waktu	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	144 Dokumen	N/A	48 Dokumen	48 Dokumen	100%	48 Dokumen	96 Dokumen	66,66%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1320 Dokumen	N/A	440 Dokumen	440 Dokumen	100%	440 Dokumen	880 Dokumen	66,66%
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4 Dokumen	N/A	0 Dokumen	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12 Dokumen	N/A	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	8 Dokumen	66,66%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	N/A	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	5 Dokumen	13 Dokumen	100%

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	N/A	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	N/A	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	N/A	1 Unit	3 Unit	300%	1 Unit	4 Unit	133,33%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	N/A	-	-	-	1 Unit	1 Unit	25%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	N/A	-	-	-	1 Unit	1 Unit	25%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	N/A	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Laporan	N/A	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	6 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	N/A	9 Laporan	9 Laporan	100%	9 Laporan	9 Laporan	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	N/A	100%	4 Jenis	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	N/A	12 Orang/bulan	11 Orang/Bulan	91,67%	13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	100%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Dokumen	N/A	6 Dokumen	6 Orang	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	N/A	9 Unit	9 Unit	100%	9 Unit	9 Unit	100%

Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	N/A	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	N/A	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	8 Unit	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	3 Unit	N/A	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	3 Unit	N/A	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100%	N/A	6 Jenis	6 Jenis	100%	6 Jenis	6 Jenis	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 Paket	N/A	6 Paket	6 Paket	100%	6 Paket	6 Paket	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	N/A	5 Paket	5 Paket	100%	5 Paket	5 Paket	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	N/A	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	N/A	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket	N/A	24 Paket	24 Paket	100%	24 Paket	24 Paket	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360 Laporan	N/A	120 Laporan	120 Kali	100%	120 Laporan	360 Laporan	100%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1584 Dokumen	N/A	528 Dokumen	528 Dokumen	100%	528 Dokumen	1056 Dokumen	66,66%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	3 Jenis	N/A	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan di kabupaten banyumas adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia,

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

3. Koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;

b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;

c. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan

d. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;

4. Koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;

b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati;

5. Koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:

a. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati;

6. Koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:

a. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;

b. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

- umum yang melibatkan pihak swasta;
- c. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati;
7. Koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
- a. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - b. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - c. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati;
8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
9. Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
- a. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - b. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - d. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah; dan
10. Penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
11. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan;

- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2025

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran Belanja Tahun 2025 dengan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.892.817.000,- dan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal terurai dalam 6 program dan 15 kegiatan dan 44 sub kegiatan sebesar Rp. 670.300.000, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2024, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Tabel 2.2

No	Indikator	Target	Realisasi		Capaian	Kenaikan/ Penurunan
			2024	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(6)	(7)
1.	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	100	50,5	0	50,5%	-
2.	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	100%	100%	100%	100%	-
3.	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	74	-	80	-	-
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	94,75	90,75	108,9%	-
5.	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	100%	100%	-
6.	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100%	100%	100%	100%	-
7.	Persentase APBDes tepat waktu	100%	100%	100%	100%	-
8.	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	-
9.	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100%	100%	0	100%	-
10.	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	100%	100%	100%	-
11.	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	100%	100%	100%	100%	-
12.	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	100%	100%	100%	100%	-
13.	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	-
14.	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	100%	100%	100%	100%	-
15.	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	-

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
16.	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	-
17.	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	-
18.	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100%	100%	100%	100%	-
19.	Persentase Pengadaan Barang	100%	100%	100%	100%	-
20.	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	100%	-

Tabel T 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Rencana Perangkat Daerah (RPD)			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan			100	100	100	100	35,25	100	
2	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan			100	100	100	100	70,5	100	
3	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan			74	76	76	81,85	-	82,2	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat			88	89	90	94,75	93,5	95,25	
5	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan			100	100	100	100	100	100	
6	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas			100	100	100	100	100	100	
7	Persentase APBDes tepat waktu			100	100	100	100	100	100	
8	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah			100	100	100	100	100	100	
9	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan			100	100	100	100	100	100	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH

1. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah;
2. Belum optimalnya partisipasi kelembagaan masyarakat terhadap dan Stunting.

3. Belum optimalnya kualitas kader potensi sumber kesejahteraan sosial ditingkat desa dan kecamatan;
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah yang mulai ditinggalkan;
5. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan desa terkendala informasi atau peraturan yang sering berubah;
6. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan desa karena belum ada kewenangan Kecamatan;
7. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan di Desa;
8. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat dikarenakan kesadaran masyarakat belum optimal dan kurangnya sosialisasi.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024 dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kalibagor sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten di bidang IT di Kecamatan Kalibagor;
2. Akses informasi yang belum merata dan kurang optimalnya sarana komunikasi yang ada dalam penyelenggaraan diseminasi informasi;
3. Ketersediaan jaringan internet dan intranet masih belum optimal;
4. Belum maksimalnya integrasi data dan sistem informasi antar perangkat daerah di Kabupaten Banyumas;
5. Kurangnya staff karena beban kerja Kasi dan Kasubag yang tinggi;
6. Banyaknya permasalahan mengenai pemberdayaan masyarakat di wilayah desa yang harus di follow up namun keterbatasan tenaga menjadi tidak bisa tercover semuanya;
7. Belum maksimal sinerginya perangkat desa yang membidang permas dan kesra dengan TKSK, PKH dan Seksi Permas di Kecamatan Kalibagor;
8. Kurang maksimalnya penggunaan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat pada kantor Kecamatan Kalibagor;

9. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang Pelayanan umum di tingkat Kecamatan yang lebih representatif;
10. Masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui syarat-syarat mengurus administrasi kependudukan dikarenakan minimnya sosialisasi dari Desa;
11. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap Petugas Pelayanan di Desa;
12. Kurangnya staff yang menguasai Trantibum;
13. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan ke Desa;
14. Masih adanya personil yang belum bekerja sesuai dengan Tugasnya dan rangkap pekerjaan.
15. Masih lambatnya penyeteroran Laporan Kegiatan setiap Seksi.
16. Seharusnya yang menduduki jabatan eselon selayaknya mempunyai pengetahuan dan IT atau ada Staffnya yang memahami IT sehingga pekerjaan yang berhubungan dengan IT bisa di terselesaikan dan Pejabatnya paham dengan Tugasnya masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kecamatan Kalibagor menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Treatment). Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kalibagor untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut:

A. Strength (Kekuatan)

1. Faktor kekuatan yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan publik.
2. SDM Kecamatan Kalibagor didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 11 ASN dan 9 orang Honorer yang terdiri dari : S-2 Sebanyak 2 Orang, S-1 sebanyak 9 orang , D-3 sebanyak 4 orang, D-1 Sebanyak 1 orang, pendidikan SMA sebanyak 4 orang. Dilihat dari pendidikan reguler, pegawai Kecamatan Kalibagor sudah cukup baik dan hal tersebut merupakan modal dasar dalam urusan pemerintahan daerah.

3. Sarana dan Prasarana

Dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Kalibagor sudah cukup memadai, baik asset yang bergerak maupun tidak bergerak.

4. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018. Tupoksi yang jelas merupakan modal dasar yang sangat penting, dan memberikan kekuatan yang jelas didalam melaksanakan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah.

B. Weakness (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi teknis operasional urusan pemerintahan daerah, Kecamatan Kalibagor juga memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Kurangnya jumlah ASN sesuai dengan peta jabatan dan masih ada beberapa yang belum mahir IT;
2. Masih kurang disiplinnya beberapa ASN;
3. Masih sering terjadi tumpang tindih tupoksi;
4. Kebersihan Kantor dan pembagian tugas perlu dikoordinasikan lagi dan diberikan pertanggungjawaban.

C. Opportunity (Peluang)

Dari analisis strength dan weakness, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung perencanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di. Peluang-peluang tersebut adalah

1. Pemberian beasiswa dari Pemda Banyumas untuk meningkatkan jenjang pendidikan dan penambahan Staff yang memahami IT dan tugasnya;
2. Tersedianya anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
3. Adanya kemauan dan keinginan dari karyawan dan karyawan untuk meningkatkan kemampuan;
4. Adanya kerjasama dengan Desa atau pihak lain untuk menyediakan data yang dibutuhkan;
5. Adanya keinginan untuk menyusun perencanaan yang baik dari berbagai pihak;
6. Adanya dukungan dari masyarakat dan legislatif ;

7. Semakin banyak pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat;
8. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada kecamatan yang lebih besar;
10. Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi yang cepat.

D. Treatment (Ancaman)

Dalam melaksanakan tupoksinya Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas tidak lepas dari adanya ancaman yang akan mempengaruhi terhadap proses teknis operasional urusan pemerintahan daerah. Ancaman yang mungkin akan terjadi antara lain:

1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan dan Pelayanan;
2. Adanya aturan-aturan yang menghambat pengembangan karier pegawai;
3. Kurangnya etos kerja;
4. Tingginya tingkat pengangguran;
5. Masih adanya jumlah penduduk yang miskin;
6. Belum tingginya semangat kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat.

Berdasarkan analisa SWOT diatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja

daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Kecamatan Kalibagor yang membantu Bupati Banyumas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah bidang pelayanan publik, sehingga semakin professional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bidang administrasi pemerintahan di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana/ prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan;
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi pemerintahan;
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan di bidang administrasi pemerintahan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan di Kecamatan;
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Kalibagor dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia;

3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurangnya optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/ tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Tugas Kecamatan Kalibagor

Kecamatan Kalibagor mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
3. Koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
- a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
 - b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - c. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - d. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
4. Koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban

- umum kepada bupati;
5. Koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati;
 6. Koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - b. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - c. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati;
 7. Koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
 - a. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - b. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - c. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati;
 8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
 9. Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
 - a. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - b. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah; dan
 10. Penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;

11. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isu-isu penting untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kalibagor pada tahun 2024 adalah:

1. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah kota;
2. Belum optimalnya kualitas kader potensi sumber kesejahteraan sosial ditingkat kelurahan dan Kecamatan;
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah;
4. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan desa;
5. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan desa;
6. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
7. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat;
8. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat;

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi Kecamatan maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan RPD Kecamatan Kalibagor Tahun 2024 – 2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Kalibagor pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut di atas, strategi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima melalui pemenuhan, penerapan SOP dan PATEN;
2. Peningkatan keterlibatan organisasi pemuda dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan;
3. Peningkatan Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Masyarakat maupun Aparat Keamanan dan Ketertiban dalam Mengantisipasi berbagai Ancaman dalam Ketetraman, Ketertiban dan Kebencanaan;
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan;

5. Memberdayakan dan Membina Kader PKK untuk Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan di Desa;
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle);
7. Melakukan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasaan APBDes;
8. Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender dan Anak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan;
9. Mewujudkan ASN yang tangguh di teknologi informasi khususnya terkait aplikasi yang berhubungan dengan E-Office.

Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Menuju Pelayanan Prima sesuai Tuntutan Masyarakat;
2. Peningkatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan tingkat kecamatan dan Desa;
3. Peningkatan Pembinaan Linmas di Kecamatan dan Desa;
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan dan Desa dalam Perencanaan Pembangunan, dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang;
5. Peningkatan Pemberdayaan dan Pembinaan Posyandu, Lembaga dan Organisasi Masyarakat;
6. Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasaan APBDes;
7. Pengiriman ASN ke berbagai Diklat maupun pelatihan yang terkait Aplikasi dalam Subbag Umum dan kepegawaian maupun Perencanaan dan Keuangan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kecamatan Kalibagor telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPD Kecamatan Kalibagor Tahun 2024-2026 guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen Rancangan Renja memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review

terhadap rancangan Awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/ tolok ukur dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/ kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kalibagor dan Identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan pembiayaan penerimaan daerah berikut pendanaan indikatif.

Tabel 2.4 T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Kecamatan Kalibagor

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan				
	PROGRAM /	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PROGRAM /	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.418.214.999,00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.418.214.999,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	6.000.000,00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Dokumen	6.990.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 Dokumen	3.990.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.717.888.544,00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan</i>	100 %	1.980.648.544,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	13 Orang/bulan	1.686.788.544,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	12 Orang/bulan	1.980.648.544,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	6 Dokumen	31.100.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	6 Dokumen	19.860.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	200.058.455,00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan</i>	100 %	196.643.700,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				

		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	8.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	7.351.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	27.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	11.389.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	8.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	5.989.500,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	70.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	70.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	12.058.455,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	12.108.200,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	75.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	86.406.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	528 Dokumen	-	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	528 Dokumen	3.400.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang	100 %	53.500.000,00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang	100 %	79.679.000,00		
	Pengadaan Mebel						Pengadaan Mebel				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	20.500.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	17.679.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua	

					Kel/Desa					Kel/Desa	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit	25.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit	60.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	4 Unit	8.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	4 Unit	2.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	360.500.000,00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan</i>	100 %	317.233.756,00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	71.500.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	82.412.800,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	6 Laporan	19.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	6 Laporan	6.950.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	9 Laporan	270.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	227.870.956,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	80.268.000,00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	100 %	112.840.000,00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	9 Unit	40.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	9 Unit	39.560.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	
	Pemeliharaan Mebel						Pemeliharaan Mebel				
		<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	10 Unit	6.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua		<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	10 Unit	7.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua	

					Kel/Desa					Kel/Desa
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	8 Unit	12.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	8 Unit	14.780.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit	22.268.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit	45.500.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit	6.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit	6.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			88.000.000,00		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			20.800.000,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	7.000.000,00		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan</i>	100 %	5.000.000,00	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
		<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	4 Laporan	7.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	4 Laporan	2.500.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	9.000.000,00		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan</i>	4 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
		<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	60 Laporan	9.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	60 Laporan	3.500.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	12.000.000,00		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	<i>Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana</i>	100 %	2.500.000,00	

						umum			
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				
		<i>Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>	4 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>	4 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa
	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta				Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta				
		<i>Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta</i>	4 Unit	6.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta</i>	4 Unit	6.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	60.000.000,00		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</i>	100 %	9.800.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				
		<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan</i>	4 Laporan	45.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan</i>	4 Laporan	8.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				
		<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	4 Laporan	1.800.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa
3,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			62.000.000,00		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		44.710.000,00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	44.000.000,00		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat desa</i>	100 %	35.860.000,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				
		<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	6 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	6 Lembaga Kemasyarakatan	9.950.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				

		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	8 Dokumen	14.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	8 Dokumen	5.920.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	15.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	19.990.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	18.000.000,00		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	100 %	8.850.000,00		
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyar akat an	6.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyar akatan	-	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyar akat an	6.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyar akatan	4.450.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	6.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	4.400.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	
4,	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			19.000.000,00		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			44.450.000,00		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	19.000.000,00		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	40.000.000,00		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilavah Kecamatan						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilavah Kecamatan				

		<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	6 Laporan	12.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	6 Laporan	36.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				
		<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	4 Laporan	7.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	4 Laporan	4.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah</i>	100 %	-		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah</i>	100 %	4.450.000,00		
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				
		<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	6 Laporan	-	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	6 Laporan	4.450.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	
5,	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			55.000.000,00		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			59.100.000,00		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	55.000.000,00		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ang ditugaskan</i>	16 Kegiatan	59.100.000,00		
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>	30 Orang	6.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>	30 Orang	6.600.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				

		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	60 Orang	6.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	60 Orang	-	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60 Orang	6.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60 Orang	-	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	37.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	52.500.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa
6,	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			30.500.001,00		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			21.620.000,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	30.500.001,00		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang Mendapatkan pendampingan	100 %	21.620.000,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	48 Dokumen	8.500.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	48 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	440 Dokumen	14.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	440 Dokumen	9.900.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	1,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	-	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				

		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4 Dokumen	2.300.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	24 Dokumen	5.920.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	24 Dokumen	5.920.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa
				2.684.715.000,00					2.884.715.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan Kalibagor menambah usulan Program dan kegiatan berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat biasanya berkaitan dengan kegiatan teknis SKPD di luar Kecamatan, namun perencanaan KUA dan PPAS tetap dilaksanakan oleh Bappeda sebagai SKPD Perencana di Kabupaten Banyumas semua kegiatan SKPD baik dari musrenbang/ masyarakat maupun usulan dari Dinas/ Lemtekda/ Badan/ Kecamatan dan Desa.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Banyumas

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Kalibagor

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rehabilitasi Gedung Kantor Desa Pajerukan, Kab. Banyumas	Jl. Desa Pajerukan RT 06 RW 01		Rp. 200.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Kab/Kota
2	Rehab Balai Pertemuan Masyarakat Desa, Kab. Banyumas	Desa Suro RT 01 RW 02 Kec, Kalibagor, Kab. Banyumas		Rp. 200.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Kab/Kota
3	Pembangunan Bronjong Blok Sawangan RT 06 RW 01 Desa Kalisogra Wetan, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Kab. Banyumas	Blok Sawangan RT 06 RW 01 Desa Kalisogra Wetan, Kec. Kalibagor, Kabupaten Banyumas		Rp. 200.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Kab/Kota
4	Pembangunan Jalan usaha Tani Blok Gringging Blok Gringging Kadus II Desa Petir, Kab. Banyumas	Blok Gringging Kadus II Desa Petir, Kec. Kalibagor Kab. Banyumas		Rp. 200.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Kab/Kota
5	Pengaspalan Jalan Lingkungan RW 04 RT 06 – RT 09 Desa Karangdadap Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas	RW 04 RT 06 - RT 09 Desa Karangdadap Kec. Kalibagor Kab. Banyumas		Rp. 200.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Kab/Kota
6	Peningkatan Jalan RT 004 RW 004, Kab. Banyumas	RT 004 RW 004, Desa Kalibagor Kec. Kalibagor Kab. Banyumas		Rp. 200.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Kab/Kota
7	Pembangunan Rehab Kantor Balai Desa Wlahar	Jalan Raya Patikraja - Banyumas, RT.006		Rp. 200.000.000	Bantuan Sarana

	Wetan, Jalan Raya Patikraja - Banyumas, RT.006 RW.001 Dusun 01 Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor., Kab. Banyumas	RW.001 Dusun 01 Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor, Kab. Banyumas			Prasarana Kab/Kota
8	Pembangunan Gedung Aula Lantai 2 Kantor Desa Kalicupak Lor	Jl Balai Desa No.23 RT 04 RW 01 Desa Kalicupak Lor Kec. Kalibagor Kab. Banyumas		Rp. 200.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Kab/Kota
9	Rehabilitasi Gedung Balai Desa Kalicupak Kidul RT 03 RW 01 Desa Kalicupak Kidul, Kab. Banyumas	Desa Kalicupak Kidul RT 03 RW 01 Desa Kalicupak Kidul, Kab. Banyumas		Rp. 200.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Kab/Kota
10	Peningkatan Jalan Suwardjono Pekaja - Sangkal putung Sokaraja, Kab. Banyumas	Jalan Suwardjono Pekaja - Sangkal putung Sokaraja, Kab. Banyumas		Rp. 500.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Kab/Kota
11	Pembangunan, Pelebaran, Rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan jalan	RT 06 dan RT 02 RW 03, Kec. Kalibagor Kab. Banyumas		Rp. 200.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Kab/Kota
12	Pembangunan Talud Jalan Kabupaten Jalur Jalan Kaliori Suro di lokasi Jln Bangin Desa Srowot, Kab. Banyumas	Jalan Kabupaten Jalur Jalan Kaliori Suro di lokasi Jln Bangin Desa Srowot, Kec. Kalibagor Kab. Banyumas		Rp. 300.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Kab/Kota

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi yang ada di kecamatan Kalibagor dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektifitas pelaksanaan program/kegiatan, serta efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut:

- a. Nama Inovasi, Membangun Kemandirian Desa Melalui Gotong Royong (Merinding)
- b. Tujuan dan Latar belakang inovasi, Tujuan penulisan inovasi ini adalah 1. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, 2. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan, 3. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait. Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten, Camat melaksanakan sebagian

kewenangan Bupati yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, Camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada Camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Sebagai perangkat daerah kabupaten sekaligus sebagai penyelenggaraan pemerintahan umum Camat berkewajiban mengamankan dan melaksanakan Visi, Misi, Program dan Kegiatan di tingkat Kecamatan yang tentunya berpedoman pada tugas dan fungsi Camat. Dalam rangka mewujudkan program kerja Bupati dan Wakil Bupati Banyumas maka Camat secara langsung telah terlibat dalam mengawal program desa melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Hal ini dimaksudkan agar dapat dipastikan program kerja Bupati dan Wakil Bupati dapat berjalan dengan baik, terarah dan terprogram sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ataupun Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) setiap tahun. Keterlibatan masyarakat baik dalam perencanaan kegiatan maupun pelaksanaan akan dapat memastikan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai yang diharapkan oleh sebuah organisasi.

- c. Bentuk dan ruang lingkup inovasi, sebagai salah satu sumbangsih Kecamatan Kalibagor dalam pengentasan kemiskinan dapat terlaksana melalui upaya upaya sebagai berikut, 1. Membangkitkan semangat Gotong Royong membangun desa, 2. Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa melalui perencanaan yang baik secara gotong royong dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan di desa, 3. Swasta (badan hukum) dapat mengalokasikan anggaran sosial (CSR) sesuai Proposal / usulan desa dalam rangka sumbangsih nya dalam pengentasan kemiskinan, 4. Masyarakat termasuk orang sukses dapat menyumbangkan dana, tenaga, pemikiran secara bersama sama untuk mengentaskan kemiskinan di desa tempat kelahirannya, 5. Dukungan masyarakat secara langsung yang dapat dilakukan di setiap Desa adalah a. JIDES-JIDAT MIS (Siji Desa Siji Dat Kemiskinan), b. PESANBEBAS (Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis

- Masyarakat), c. BANG TANAMAN (Bangga Memiliki Tanaman), d. JIDES- JITU (Siji Desa Siji Tanaman Unggulan), e. PUNG WAN (Kampung Hewan), f. KASIHKU (Kali Bresihku), g. KRC(Kalibagor Reaksi Cepat), h. SAMBATAN (kerja tanpa bayaran), i. NGENEKI (kerja kepada yang sudah ahli/sukses). 6. Sebuah kegiatan berbasis masyarakat akan dapat berhasil apabila didukung oleh seluruh lapisan masyarakat dan komitmen bersama untuk saling membantu (Gotong Royong), sesuai dengan kemampuannya.
- d. Tahun mulai pelaksanaan dan status pelaksanaan, Inovasi ini dimulai sejak 2024 dan statusnya sekarang sedang dilaksanakan tahun ke-2.
- e. Hasil/impact yang telah dicapai, Desa mulai mandiri dengan berbagai inovasi yang ada dari a. JIDES-JIDAT MIS (Siji Desa Siji Dat Kemiskinan), b. PESANBEBAS (Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat), c. BANG TANAMAN (Bangga Memiliki Tanaman), d. JIDES- JITU (Siji Desa Siji Tanaman Unggulan), e. PUNG WAN (Kampung Hewan), f. KASIHKU (Kali Bresihku), g. KRC(Kalibagor Reaksi Cepat), h. SAMBATAN (kerja tanpa bayaran), i. NGENEKI (kerja kepada yang sudah ahli/sukses).
- f. Rencana pengembangan inovasi, akan dilaksanakan semaksimal mungkin dan menambah inovasi yang ada di desa-desa di wilayah Kecamatan Kalibagor secara bertahap setiap tahunnya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Prioritas pembangunan daerah tahun 2026 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2026 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Selain itu prioritas pembangunan merupakan program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

RKP Tahun 2026 merupakan penjabaran dari dokumen RPJMN 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 didasarkan atas Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Tahun 2025-2029, yaitu *“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”*. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 8 (delapan) Misi pembangunan/ Asta Cita, yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional. Prioritas Nasional tersebut antara lain:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 disusun pentahapan fokus kebijakan pembangunan daerah. Arah kebijakan pada tahun 2026 fokus diarahkan pada kebijakan “Meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional”. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan kebijakan tersebut antara lain:

1. peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. penguatan sistem agroforestry berbasis potensi lokal;
5. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (large scale food fortification/LSFF);
8. pencegahan pemborosan pangan (food loss and waste).

Pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 juga diarahkan untuk “Penguatan Landasan Pembangunan Daerah” dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah yaitu:

1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis.
2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan.
3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Rencana pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2026 disusun untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD. Adapun visi yang ditetapkan adalah: *“Mewujudkan Banyumas yang Produktif, Adil, dan Sejahtera.”* Perwujudan visi tersebut dijabarkan melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing SDM;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri, dan menyejahterakan;
3. Memperkuat ketahanan pangan;
4. Meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah berintegritas, adaptif, dan kolaboratif serta mendukung peningkatan daya saing daerah;
6. Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029, RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026 diarahkan untuk *“Penyiapan penguatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi untuk peningkatan kualitas SDM dan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang adaptif”*. Secara keseluruhan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2026 diprioritaskan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu secara inklusif
- b. Meningkatkan budaya literasi, pengelolaan olahraga dan kebudayaan Banyumas untuk penguatan Karakter Sumber Daya Manusia yang unggul
- c. Meningkatkan pembangunan keluarga yang memperhatikan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, kesetaraan gender, pemenuhan hak dan perlindungan masyarakat secara inklusif, serta peningkatan peran aktif pemuda
- d. Meningkatkan pengembangan SDM dan kelembagaan pelaku ekonomi
- e. Penguatan Implementasi regulasi yang hijau dan adaptif
- f. Meningkatkan pengembangan produk potensial dan produk unggulan serta penguatan sarana dan prasarana pendukung
- g. Meningkatkan penanganan kemiskinan dan pelayanan perlindungan sosial secara terintegrasi
- h. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan penurunan pengangguran

- i. Memperkuat Ketahanan Pangan Lokal dengan peningkatan produksi dan produktivitas pangan serta pengembangan pangan lokal
- j. Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah dengan infrastruktur dan konektivitas serta instrumen pendukung yang memadai dan berkelanjutan
- k. Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi mendukung Reformasi Birokrasi
- l. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah secara berkelanjutan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran dilakukan untuk merespons isu-isu strategis yang telah diidentifikasi. Nama Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bertanggung jawab membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelayanan Publik.

Rencana pembangunan disusun untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD. Adapun visi yang ditetapkan adalah: “Mewujudkan Banyumas yang Produktif, Adil, dan Sejahtera.” Perwujudan visi tersebut dijabarkan melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing SDM;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri, dan menyejahterakan;
3. Memperkuat ketahanan pangan;
4. Meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah berintegritas, adaptif, dan kolaboratif serta mendukung peningkatan daya saing daerah;
6. Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029, RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026 diarahkan untuk “Penyiapan penguatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi untuk peningkatan kualitas SDM dan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang adaptif”.

Adapun tujuan dan sasaran dalam Renja Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun 2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kalibagor beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan dalam tabel berikut :

TUJUAN	SASARAN
<i>Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas</i>	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kecamatan

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor – faktor yang menjadikan bahan pertimbangan SKPD kami dalam merumuskan program dan kegiatan, adalah disamping untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi SKPD juga ada pertimbangan lain seperti:

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- b. Pencapaian SDGs,
- c. Pengentasan kemiskinan,
- d. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
- a. Dengan adanya pertimbangan – pertimbangan melalui desk RKPD 2025, kami telah menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja Tahun 2026 sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pagu: **Rp. 2.712.715.000**

Kegiatan:

- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu Anggaran: Rp. 6.000.000

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Pagu Anggaran: Rp. 3.000.000
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pagu Anggaran: Rp. 3.000.000

- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pagu Anggaran: Rp. 2.135.715.000

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pagu Anggaran: Rp. 2.115.715.000

- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Pagu Anggaran: Rp. 20.000.000
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pagu Anggaran: Rp. 141.500.000
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pagu Anggaran: Rp. 5.000.000
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pagu Anggaran: Rp. 12.000.000
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Pagu Anggaran: Rp. 4.000.000
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pagu Anggaran: Rp. 60.000.000
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Pagu Anggaran: Rp. 7.000.000
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pagu Anggaran: Rp. 50.000.000
 - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Pagu Anggaran: Rp. 3.500.000
- d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pagu Anggaran: Rp. 24.000.000
 - 1) Pengadaan Mebel
Pagu Anggaran: Rp. 10.000.000
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pagu Anggaran: Rp. 10.000.000
 - 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pagu Anggaran: Rp. 4.000.000
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pagu Anggaran: Rp. 326.000.000
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pagu Anggaran: Rp. 80.000.000
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pagu Anggaran: Rp. 6.000.000

- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pagu Anggaran: Rp. 240.000.000
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pagu Anggaran: Rp. 59.500.000
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pagu Anggaran: Rp. 30.000.000
 - 2) Pemeliharaan Mebel
Pagu Anggaran: Rp. 3.000.000
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
Pagu Anggaran: Rp. 8.000.000
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
Pagu Anggaran: Rp. 15.000.000
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
Pagu Anggaran: Rp. 3.500.000
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pagu: Rp. 28.000.000
 - a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pagu Anggaran: Rp. 4.000.000
 - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Pagu Anggaran: Rp. 4.000.000
 - b) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Pagu Anggaran: Rp. 4.000.000
 - 1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Pagu Anggaran: Rp. 4.000.000
 - c) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Pagu Anggaran: Rp. 8.000.000

- 1) Koordinasi/Sinergi dengan perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pelayanan Umum

Pagu Anggaran: Rp. 4.000.000

- 2) Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta

Pagu Anggaran: Rp. 4.000.000

- d) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Pagu Anggaran: Rp. 12.000.000

- 1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan

Pagu Anggaran: Rp. 10.000.000

- 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

Pagu Anggaran: Rp. 2.000.000

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pagu: Rp. 47.000.000

- a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pagu Anggaran: Rp. 38.000.000

- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa

Pagu Anggaran: Rp. 14.000.000

- 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan

Pagu Anggaran: Rp. 10.000.000

- 3) Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan

Pagu Anggaran: Rp. 14.000.000

- b) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Pagu Anggaran: Rp. 9.000.000

- 1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Pagu Anggaran: Rp. 3.000.000

- 2) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Pagu Anggaran: Rp. 3.000.000

- 3) Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Pagu Anggaran: Rp. 3.000.000
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Pagu: Rp. 20.000.000
 - a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Pagu Anggaran: Rp. 20.000.000
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
Pagu Anggaran: Rp. 18.000.000
 - 2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Pagu Anggaran: Rp. 2.000.000
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Pagu: Rp. 51.000.000
 - a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah
Pagu Anggaran: Rp. 51.000.000
 - 1) Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Pagu Anggaran: Rp. 3.000.000
 - 2) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Pagu Anggaran: Rp. 3.000.000
 - 3) Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
Pagu Anggaran: Rp. 3.000.000
 - 4) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Pagu Anggaran: Rp. 42.000.000
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Pagu: Rp. 26.000.000
 - a) Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pagu Anggaran: Rp. 26.000.000

- 1) Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Pagu Anggaran: Rp. 8.000.000

- 2) Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan
Pendayaagunaan Aset Desa

Pagu Anggaran: Rp. 12.000.000

- 3) Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pagu Anggaran: Rp. -

- 4) Rekomendasi Pengangkatan dan pemberhentian
Perangkat Desa

Pagu Anggaran: Rp. 6.000.000

d. Tabel rencana Matriks Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kalibagor
Tahun 2026:

Tabel 3.1 T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Banyumas
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kalibagor

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF (Rp)
	KECAMATAN KALIBAGOR			2.884.715.000,00					2.684.715.000,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.884.715.000,00					2.684.715.000,00
7.01	KECAMATAN			2.884.715.000,00					2.684.715.000,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	2.694.035.000,00				100%	2.512.715.000,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Dokumen	6.990.000,00				4 Dokumen	7.000.000,00
7.01.01.2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 Dokumen	3.990.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	4.000.000,00
7.01.01.2.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	3.000.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan</i>	100 %	1.980.648.544,00				100 %	1.906.888.544,00
7.01.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	12 Orang/bulan	1.960.788.544,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 Orang/bulan	1.886.388.544,00
7.01.01.2.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	6 Dokumen	19.860.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Dokumen	20.500.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan</i>	100 %	196.643.700,00				100 %	164.558.456,00
7.01.01.2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								

		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	6 Paket	7.351.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Paket	6.000.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	5 Paket	11.389.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Paket	12.000.000,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	4 Paket	5.989.500,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	6.000.000,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	70.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	70.000.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	24 Paket	12.108.200,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Paket	11.058.456,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	36 Laporan	86.406.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36 Laporan	55.000.000,00
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	528 Dokumen	3.400.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		528 Dokumen	4.500.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang</i>	100 %	79.679.000,00				100 %	63.000.000,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	1 Unit	17.679.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	25.000.000,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit	60.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	30.000.000,00
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	4 Unit	2.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Unit	8.000.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan</i>	100 %	317.233.756,00				100 %	274.000.000,00

	Daerah							
7.01.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	82.412.800,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	80.000.000,00
7.01.01.2.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	6 Laporan	6.950.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Laporan	9.000.000,00
7.01.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	227.870.956,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	185.000.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	100 %	112.840.000,00			100 %	97.268.000,00
7.01.01.2.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	9 Unit	39.560.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9 Unit	40.000.000,00
7.01.01.2.09.000 5	Pemeliharaan Mebel							
		<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	10 Unit	7.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Unit	7.000.000,00
7.01.01.2.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	8 Unit	14.780.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8 Unit	15.000.000,00
7.01.01.2.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit	45.500.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Unit	27.268.000,00
7.01.01.2.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit	6.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Unit	8.000.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			20.800.000,00				28.000.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan</i>	100 %	5.000.000,00			100 %	7.000.000,00

7.01.02.2.01.000 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
		<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	4 Laporan	2.500.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	3.500.000,00
7.01.02.2.01.000 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	4 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	3.500.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan</i>	100 %	3.500.000,00				100 %	5.000.000,00
7.01.02.2.02.000 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	60 Laporan	3.500.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60 Laporan	5.000.000,00
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	<i>Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum</i>	100 %	2.500.000,00				100 %	3.500.000,00
7.01.02.2.03.000 1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum								
		<i>Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>	4 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	3.500.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</i>	100 %	9.800.000,00				100 %	12.500.000,00
7.01.02.2.04.000 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan								
		<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan</i>	4 Laporan	8.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	10.000.000,00
7.01.02.2.04.000 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
		<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	4 Laporan	1.800.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	2.500.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			44.710.000,00					47.000.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat desa</i>	100 %	35.860.000,00				100 %	35.000.000,00

7.01.03.2.01.000 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
		<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	6 Lembaga Kemasyarakatan	9.950.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Lembaga Kemasyarakatan	9.000.000,00
7.01.03.2.01.000 2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								
		<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>	8 Dokumen	5.920.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Dokumen	6.000.000,00
7.01.03.2.01.000 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	60 Laporan	19.990.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60 Laporan	20.000.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat</i>	100 %	8.850.000,00				100 %	12.000.000,00
7.01.03.2.03.000 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan								
		<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	5 Lembaga Kemasyarakatan	4.450.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00
7.01.03.2.03.000 4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>	6 Laporan	4.400.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Laporan	6.000.000,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			44.450.000,00					20.000.000,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	100%	40.000.000,00				100%	14.000.000,00
7.01.04.2.01.000 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	6 Laporan	36.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Laporan	9.000.000,00
7.01.04.2.01.000 2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
		<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	4 Laporan	4.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	5.000.000,00
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan	<i>Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan</i>	100 %	4.450.000,00				100 %	6.000.000,00

	Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>peraturan kepala daerah</i>							
7.01.04.2.02.000 1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								
		<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	6 Laporan	4.450.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Laporan	6.000.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			59.100.000,00					51.000.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan</i>	16 Kegiatan	59.100.000,00				16 Kegiatan	51.000.000,00
7.01.05.2.01.000 2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>	30 Orang	6.600.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Orang	9.000.000,00
7.01.05.2.01.000 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
		<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	12 Dokumen	52.500.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	42.000.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			21.620.000,00					26.000.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Persentase desa yang mendapatkan pendampingan</i>	100 %	21.620.000,00				100 %	26.000.000,00
7.01.06.2.01.000 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa								
		<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	48 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		48 Dokumen	4.500.000,00
7.01.06.2.01.000 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
		<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	440 Dokumen	9.900.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		440 Dokumen	12.000.000,00
7.01.06.2.01.000 8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa								
		<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>	4 Dokumen	2.300.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	3.500.000,00

7.01.06.2.01.001 7	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>	24 Laporan	5.920.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Laporan	6.000.000,00
J U M L A H				2.884.715.000,00					2.684.715.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

RANCANGAN AKHIR RENJA

Rencana Kerja Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas rancangan akhir Renja dapat dilihat pada lampiran tabel berikut:

Tabel 4.1
PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN KALIBAGOR KAB. BANYUMAS TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
		KECAMATAN KALIBAGOR						2.884.715.000,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.884.715.000,00			
	7.01	KECAMATAN						2.884.715.000,00			
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.694.035.000,00			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			4 Dokumen	6.990.000,00			Kecamatan Kalibagor
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	3.990.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan</i>	-			100 %	1.980.648.544,00			Kecamatan Kalibagor
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				12 Orang/bulan	1.960.788.544,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				6 Dokumen	19.860.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan</i>	-			100 %	196.643.700,00			Kecamatan Kalibagor
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				6 Paket	7.351.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor

	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	11.389.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				4 Paket	5.989.500,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	70.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				24 Paket	12.108.200,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				36 Laporan	86.406.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				528 Dokumen	3.400.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang</i>	-			100 %	79.679.000,00			Kecamatan Kalibagor
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Unit	17.679.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	60.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	2.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan</i>	-			100 %	317.233.756,00			Kecamatan Kalibagor
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	82.412.800,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				6 Laporan	6.950.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	227.870.956,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	-			100 %	112.840.000,00			Kecamatan Kalibagor
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				9 Unit	39.560.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				10 Unit	7.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				8 Unit	14.780.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	45.500.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	6.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						20.800.000,00			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan</i>	-			100 %	5.000.000,00			Kecamatan Kalibagor
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				4 Laporan	2.500.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									

			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				4 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan</i>	-			100 %	3.500.000,00			Kecamatan Kalibagor
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				60 Laporan	3.500.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	<i>Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum</i>	-			100 %	2.500.000,00			Kecamatan Kalibagor
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum									
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>				4 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</i>	-			100 %	9.800.000,00			Kecamatan Kalibagor
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan									
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan</i>				4 Laporan	8.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				4 Laporan	1.800.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						44.710.000,00			
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat desa</i>	-			100 %	35.860.000,00			Kecamatan Kalibagor
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				6 Lembaga Kemasyarakatan	9.950.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan									

			<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>				8 Dokumen	5.920.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				60 Laporan	19.990.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat</i>	-			100 %	8.850.000,00			Kecamatan Kalibagor
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan									
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				5 Lembaga Kemasyarakatan	4.450.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat									
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>				6 Laporan	4.400.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
4,	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						44.450.000,00			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	40.000.000,00			Kecamatan Kalibagor
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				6 Laporan	36.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat									
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>				4 Laporan	4.000.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah</i>	-			100 %	4.450.000,00			Kecamatan Kalibagor
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau</i>				6 Laporan	4.450.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor

			Kepolisian Negara Republik Indonesia								
5,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						59.100.000,00			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	-			16 Kegiatan	59.100.000,00			Kecamatan Kalibagor
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				30 Orang	6.600.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
	7.01.05.2.01.0008										
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	52.500.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
6,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						21.620.000,00			
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	-			100 %	21.620.000,00			Kecamatan Kalibagor
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				48 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa									
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				440 Dokumen	9.900.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa									
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				4 Dokumen	2.300.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				24 Laporan	5.920.000,00	Kab. Banyumas, Kalibagor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kalibagor
	J U M L A H							2.884.715.000,00			

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Kecamatan Kalibagor adalah **Program Tahunan** Kecamatan Kalibagor yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Kecamatan Kalibagor.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kalibagor selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Kalibagor. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Kalibagor. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Kalibagor sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Purwokerto, 4 Juli 2025

CAMAT KALIBAGOR



Drs. LEONALTO ADI SASMITA, M.Si

NIP. 19690722 199101 1 002

REGISTER RISIKO KECAMATANKALIBAGOR
TAHUN 2026

No	Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran/ Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/K E/T E	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	Adanya penyimpangan dalam pengelolaan APBdes	Kurangnya pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan APBDes	Adanya kasus hukum berkaitan dengan pengelolaan APBdes	Pemerintah Desa	Monitoring dan Evaluasi Keuangan Pemerintah Desa	E	Keterbatasan SDM Perangkat Desa dan ketidakjujuran dalam pengelolaan keuangan	Monitoring dan Evaluasi Keuangan Pemerintah Desa dengan penekanan aturan yang berlaku beserta resikonya	Seksi Pemerintahan Desa	Semester I dan Semester II (1 Tahun)
2	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Belum adanya sinergitas antar instansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan	Kurangnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	Terhambatnya pencapaian tujuan	Pemerintah Kecamatan	Melaksanakan kooordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pemerintah di Wilayah Kecamatan	E	Sering terjadinya benturan jadwal kegiatan sehingga belum optimal sinergitas dan koordinasi dengan Instansi terkait	Melaksanakan kooordinasi dan sinergitas secara rutin (bulanan) dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Wilayah Kecamatan	Seksi Pelayanan	Semester I dan Semester II (1 Tahun)